



Reformasi Pendidikan: Nalar, Karakter dan Aksi Nyata

Nabila Aulia Salsabila Albahar¹, Mohamad Pasha Maaruf², Hasranti Aprilia Saleh³, Dwi Ariyanti Putri Djumu⁴, Siti Hajar Kaisuku⁵, Najwa Atisyah Pratiwi⁶, Ainun Sri Mulyani⁷, Tasyah⁸, Firmansyah Koesyono Efendi⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Program Studi DIII Teknik Kardiovaskular, Universitas Megarezky

E-mail: nabila.aulia13121@sma.belajar.id¹, pashamaaruf00@gmail.com², apriliasaleh06@gmail.com³, putridjumu05@gmail.com⁴, sitti.hajar9752@gmail.com⁵, najwaatisyahpratiwi@gmail.com⁶, ainunsrimulyani60@gmail.com⁷, tasyaaypatandra@gmail.com⁸, firmansahefe0@gmail.com⁹

Article Info

Article history:

Received January 07, 2026

Revised January 09, 2026

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Education Reform, Critical Thinking, Character Education, Merdeka Curriculum, The Role Of Teachers, Educational Equity

ABSTRACT

*Educational reform in Indonesia faces urgent challenges in addressing the critical reasoning and character crises within the learning system. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method to analyze the development and implementation of our focus on educational reform, particularly through the Kurikulum Merdeka (Independent Curriculum), during the year 2020 to 2025. The study's findings indicate that the reform has shifted the learning paradigm from a rote and transmissive approach towards the development of critical reasoning, creativity, and student-centered project-based learning. Character education is systematically integrated into the curriculum and school culture to shape students with integrity and resilience as per the *Pelajar Pancasila* (Pancasila Student) profile. The teacher's role has transformed from being a source of knowledge to becoming a facilitator and reflective mentor, although challenges such as pedagogical readiness, resource disparities, and administrative burdens still hinder optimal implementation. Furthermore, the success of the reform heavily depends on the ability to address implementation gaps between regions, particularly between urban and disadvantaged, remote, and frontier (3T) areas. This study concludes that educational reform is a multidimensional process requiring policy consistency, strengthening teacher capacity, an equitable approach, and the collective commitment of all stakeholders to achieve sustainable and inclusive learning transformation.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 07, 2026

Revised January 09, 2026

Accepted January 11, 2026

ABSTRAK

Reformasi pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan mendesak untuk mengatasi krisis nalar kritis dan karakter dalam sistem pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis perkembangan dan implementasi reformasi pendidikan, khususnya melalui Kurikulum



Kata Kunci:

Reformasi Pendidikan, Nalar Kritis, Pendidikan Karakter, Kurikulum Merdeka, Peran Guru, Keadilan Pendidikan

Merdeka, dalam periode 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi telah menggeser paradigma pembelajaran dari pendekatan hafalan dan transmisif menuju pengembangan nalar kritis, kreativitas, dan pembelajaran berbasis proyek yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan karakter diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum dan budaya sekolah untuk membentuk profil Pelajar Pancasila yang berintegritas dan resilien. Peran guru mengalami transformasi dari sumber pengetahuan menjadi fasilitator dan pendamping refleksi, meskipun tantangan seperti kesiapan pedagogis, kesenjangan sumber daya, dan beban administratif masih menghambat implementasi optimal. Selain itu, keberhasilan reformasi sangat bergantung pada kemampuan mengatasi kesenjangan implementasi antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan tertinggal, terluar, terpencil (3T). Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi pendidikan merupakan proses multidimensional yang memerlukan konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas guru, pendekatan yang berkeadilan, serta komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai transformasi pembelajaran yang berkelanjutan dan inklusif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nabila Aulia Salsabila Albahar
Universitas Megarezky

Email: nabila.aulia13121@sma.belajar.id

PENDAHULUAN

Saat ini pendidikan di Indonesia menghadapi krisis nalar kritis yang mengkhawatirkan. Gejala ini terlihat dari dominasi metode pengajaran yang lebih menekankan pada hafalan dan penguasaan materi ketimbang kemampuan berpikir kritis dan analitis. Menurut data dari PISA (*Programme for International Student Assessment*) 2022, Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor: matematika (379), sains (398), dan membaca (371) (Kompas.id, 2025; OECD, 2023). Hasil tersebut menunjukkan bahwa walaupun secara peringkat Indonesia naik, akan tetapi skornya mengalami penurunan (GoodStats, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa siswa-siswi kurang terlatih untuk menganalisis informasi dan mempertanyakan fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Lebih jauh lagi, Pusat Riset Penggerak Indonesia Cerdas (PRPIC) dalam penelitian menemukan bahwa 97,1% pelatihan guru ternyata tidak mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis (BeritaPolitik.id, 2024). Studi oleh (Umroh et al., 2025) dan (Hidayah, 2021) mengungkap bahwa sistem pembelajaran di sekolah cenderung berorientasi pada hafalan daripada penalaran, sehingga menghambat pengembangan nalar kritis. Studi (Ariadila et al., 2023) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis yaitu latar belakang kehidupan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Temuan (Rohman, 2022) mengungkapkan bahwa literasi berbanding lurus dengan tingkat kemampuan berpikir kritis. Semakin rendah tingkat literasi semakin rendah pula daya berpikir kritis.



Reformasi pendidikan abad ke-21 tidak hanya berkuat pada peningkatan sarana fisik, melainkan juga pada penguatan **nalar kritis** peserta didik sebagai fondasi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, nalar kritis menjadi prasyarat untuk membentuk generasi yang mampu menganalisis kompleksitas masalah, mengevaluasi informasi secara objektif, serta merancang solusi inovatif berbasis bukti ilmiah. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional masih cenderung mengutamakan hafalan dan orientasi nilai ujian, sehingga kurang memberi ruang bagi pengembangan kemampuan bernalar tinggi (higher-order thinking skills). Penelitian oleh Firdaus dkk. (2022) mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis nalar kritis dapat meningkatkan kemampuan literasi sains dan numerasi siswa secara signifikan. Sementara itu, laporan PISA (2022) mencatat bahwa skor penalaran kreatif siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD, mengindikasikan urgensi transformasi metode pembelajaran yang berfokus pada penalaran logis dan sistematis. Oleh karena itu, integrasi penguatan nalar ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran menjadi langkah strategis dalam reformasi pendidikan yang berkelanjutan.

Pendidikan karakter dalam konteks reformasi pendidikan tidak lagi sekadar wacana melainkan menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun fondasi bangsa yang berintegritas dan resilien. Krisis karakter yang tercermin dalam maraknya fenomena intoleransi, kekerasan, dan degradasi moral di kalangan generasi muda menuntut reorientasi sistem pendidikan yang holistik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penguatan karakter berbasis nilai-nilai kebijakan universal (seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati) yang terintegrasi dalam kurikulum dan budaya sekolah berkontribusi signifikan terhadap pembentukan profil Pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2022).

Studi oleh Lickona dan Davidson (2021) menegaskan bahwa pendekatan *character based education* yang melibatkan pembiasaan, keteladanan, dan refleksi kritis mampu mengembangkan moral reasoning dan komitmen sosial peserta didik. Oleh karena itu, reformasi pendidikan harus menempatkan pembangunan karakter sebagai inti dari proses pembelajaran untuk mewujudkan tindakan nyata yang beretika dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis studi literatur yang mencari referensi teoritis yang berkaitan dengan kasus atau masalah yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan metode metode Systematic Literature Review (SLR) atau studi pustaka yang menekankan pada analisis yang mendalam mengenai sumber-sumber dan data yang tersedia, serta memanfaatkan teori atau konsep untuk menganalisis permasalah-permasalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Metode ini memungkinkan Pengumpulan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dari artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi, memberikan wawasan komprehensif tentang isu-isu yang ada (Sari, 2021).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan fakta-fakta, dilanjutkan dengan analisis yang tidak hanya memaparkan tetapi juga memberikan pengertian dan penjelasan yang cukup.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi pendidikan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada perubahan struktur kurikulum, tetapi juga pada transformasi orientasi pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka diposisikan sebagai respons terhadap tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta kemandirian belajar. Pembelajaran berbasis proyek dan penilaian autentik menjadi strategi utama dalam mendorong keterlibatan aktif peserta didik, sehingga proses pembelajaran tidak lagi bersifat transmisif, melainkan konstruktif dan bermakna. Temuan literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik secara lebih komprehensif (Waly, 2024; Cahya & Meliyani, 2024).

Transformasi orientasi pembelajaran ini juga mendorong terjadinya pergeseran relasi pedagogis antara guru dan peserta didik menuju hubungan yang lebih dialogis dan partisipatif. Peserta didik diberikan ruang untuk mengonstruksi pengetahuan melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi kritis. Lingkungan belajar yang partisipatif berkontribusi terhadap peningkatan *student engagement* dan rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Kurikulum Merdeka dengan demikian berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membangun pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan individu dan tantangan sosial yang dinamis. Pendekatan ini memperkuat peran sekolah sebagai ruang pembelajaran yang adaptif dan inovatif (Waly, 2024).

Pendidikan karakter merupakan inti dari agenda reformasi pendidikan nasional. Pendidikan karakter tidak ditempatkan sebagai muatan tambahan, melainkan diintegrasikan secara sistematis dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, serta budaya sekolah. Nilai-nilai karakter seperti integritas, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial ditanamkan melalui pembelajaran kontekstual serta pembiasaan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Berbagai studi menunjukkan bahwa integrasi pendidikan karakter yang dilakukan secara konsisten berkontribusi terhadap pembentukan perilaku positif dan penguatan identitas moral peserta didik sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila (Setyowati & Sutikno, 2024; Rahayu et al., 2025). Dengan demikian, reformasi pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan etika sosial yang kuat. Lebih lanjut, literatur menekankan bahwa efektivitas pendidikan karakter sangat bergantung pada konsistensi antara kebijakan, praktik pembelajaran, dan budaya sekolah. Pendidikan karakter yang hanya bersifat normatif tanpa internalisasi dalam praktik keseharian dinilai kurang berdampak signifikan. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis nilai perlu disertai dengan keteladanan guru dan iklim sekolah yang mendukung. Integrasi karakter yang autentik juga membantu peserta didik mengembangkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Hal ini memperkuat posisi pendidikan karakter sebagai fondasi utama reformasi pendidikan nasional (Rahayu et al., 2025).

Keberhasilan reformasi pendidikan sangat ditentukan oleh transformasi peran guru sebagai aktor kunci implementasi kebijakan. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, guru tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran, pendamping refleksi, serta penggerak penguatan nilai dan karakter peserta didik (Waly, 2024).



Transformasi ini menuntut perubahan budaya profesional guru, khususnya dalam perencanaan pembelajaran diferensiatif, penerapan asesmen formatif, dan pengembangan praktik reflektif yang berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa guru yang memahami filosofi reformasi pendidikan secara mendalam cenderung lebih adaptif dalam menerapkan pembelajaran aktif dan berbasis proyek. Namun demikian, kajian SLR juga menemukan kecenderungan sebagian guru menjalankan kurikulum secara administratif tanpa pemaknaan pedagogis yang kuat, sehingga esensi reformasi berisiko tereduksi menjadi sekadar perubahan dokumen kurikulum (Setyowati & Sutikno, 2024). Oleh karena itu, continuous professional development melalui praktik reflektif, kolaborasi profesional, dan professional learning community dipandang krusial untuk meningkatkan kualitas implementasi kurikulum dan internalisasi nilai karakter di sekolah (Cahya & Meliyani, 2024).

Penguatan budaya profesional guru berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan iklim akademik sekolah. Guru yang terlibat dalam komunitas belajar profesional cenderung memiliki keterbukaan terhadap inovasi pedagogik. Praktik kolaboratif juga membantu guru mengatasi tantangan implementasi kurikulum secara kolektif. Dengan demikian, transformasi peran guru tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional. Reformasi pendidikan yang berkelanjutan menuntut ekosistem profesional yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat bagi pendidik (Waly, 2024).

Meskipun arah reformasi pendidikan menunjukkan perkembangan yang positif, literatur mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Kesiapan pendidik menjadi salah satu kendala utama, terutama terkait pemahaman konseptual dan keterampilan pedagogik dalam menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter.

Keterbatasan sarana prasarana serta kesenjangan akses teknologi masih menjadi hambatan nyata, khususnya di daerah tertinggal dan satuan pendidikan dengan dukungan sumber daya yang terbatas. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif dan pendampingan yang berkelanjutan. Literatur juga mencatat bahwa sistem penilaian yang masih didominasi pendekatan tradisional dapat menghambat pengembangan kompetensi holistik peserta didik (Cahya & Meliyani, 2024; Waly, 2024).

Lebih jauh, literatur menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan struktural. Resistensi terhadap perubahan dan beban administratif yang tinggi sering kali menghambat inovasi pembelajaran. Koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan belum sepenuhnya optimal. Tanpa sinergi kebijakan dan dukungan sumber daya yang memadai, reformasi pendidikan berisiko berjalan secara parsial. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional menjadi prasyarat penting keberhasilan reformasi (Cahya & Meliyani, 2024).

Reformasi pendidikan memiliki implikasi penting terhadap aspek keadilan dan pemerataan akses pendidikan. Fleksibilitas yang ditawarkan Kurikulum Merdeka memungkinkan satuan pendidikan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal, namun kapasitas implementasi antar sekolah tidak seragam. Sekolah di wilayah perkotaan dengan sumber daya yang lebih baik cenderung lebih cepat beradaptasi dibandingkan sekolah di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T) (Cahya & Meliyani, 2024). Kondisi ini menimbulkan risiko *implementation gap*, di mana kebijakan yang sama menghasilkan dampak berbeda akibat



perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Tanpa kebijakan afirmatif dan pendampingan khusus, reformasi berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah (Waly, 2024). Integrasi pendidikan karakter yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal dinilai lebih efektif dalam membangun identitas dan kepercayaan diri peserta didik, sehingga reformasi yang berkeadilan perlu bersifat adaptif terhadap keragaman sosial dan budaya masyarakat (Rahayu et al., 2025).

Selain itu, prinsip keadilan dalam reformasi pendidikan tidak berarti menyeragamkan kebijakan, melainkan menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan lokal. Pendekatan diferensiasi kebijakan dinilai lebih efektif dalam menjawab ketimpangan struktural antarwilayah. Dukungan afirmatif seperti pendampingan guru dan penyediaan sumber belajar kontekstual menjadi strategi penting. Dengan demikian, reformasi pendidikan yang berkeadilan memerlukan desain kebijakan yang sensitif terhadap keragaman kondisi satuan pendidikan. Hal ini memperkuat relevansi Kurikulum Merdeka sebagai kebijakan yang adaptif dan inklusif (Waly, 2024).

Sintesis literatur periode 2020–2025 menegaskan bahwa reformasi pendidikan di Indonesia merupakan proses multidimensional yang mencakup transformasi kurikulum, penguatan pendidikan karakter, perubahan peran guru, serta penataan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Keberhasilan reformasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan di tingkat pusat, tetapi terutama oleh kualitas implementasi di tingkat satuan pendidikan (Setyowati & Sutikno, 2024; Waly, 2024).

Integrasi nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi yang kompetitif secara global sekaligus beridentitas dan bertanggung jawab secara sosial (Rahayu et al., 2025). Dengan demikian, reformasi pendidikan perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Pendekatan reformasi yang berorientasi jangka panjang lebih efektif dibandingkan perubahan kebijakan yang bersifat sporadis. Reformasi pendidikan memerlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian berbasis bukti empiris. Keterlibatan guru, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan reformasi. Dengan dukungan ekosistem pendidikan yang solid, reformasi berpotensi menghasilkan transformasi nyata dalam kualitas pembelajaran (Setyowati & Sutikno, 2024).

KESIMPULAN

Reformasi pendidikan di Indonesia merupakan upaya strategis dan multidimensional dalam merespons tantangan pendidikan abad ke-21, khususnya dalam penguatan nalar kritis, pendidikan karakter, dan transformasi praktik pembelajaran. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka menjadi instrumen kunci dalam mendorong pergeseran paradigma pembelajaran dari yang berorientasi pada hafalan menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, dan bermakna, sehingga berpotensi meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta keterlibatan aktif peserta didik. Pendidikan karakter menempati posisi sentral dalam reformasi pendidikan nasional melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum, budaya sekolah, dan praktik pembelajaran yang berkontribusi pada pembentukan profil Pelajar Pancasila yang berintegritas dan bertanggung jawab, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, keteladanan



pendidik, serta dukungan iklim sekolah yang kondusif. Keberhasilan reformasi pendidikan juga sangat ditentukan oleh transformasi peran guru sebagai fasilitator pembelajaran dan penggerak nilai, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesiapan pendidik, keterbatasan sarana prasarana, kesenjangan akses teknologi, dan resistensi terhadap perubahan yang berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif dan pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi pendidikan perlu dipahami sebagai proses jangka panjang dan berkelanjutan yang menuntut konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan guna menghasilkan generasi yang unggul secara intelektual, berkarakter kuat, dan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, reformasi pendidikan di Indonesia perlu terus diperkuat melalui implementasi Kurikulum Merdeka yang konsisten dan berorientasi pada pengembangan nalar kritis, pendidikan karakter, serta pembelajaran bermakna. Pemerintah dan pemangku kebijakan disarankan untuk meningkatkan kebijakan afirmatif, khususnya dalam pemerataan sarana prasarana dan akses teknologi, guna meminimalkan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Selain itu, penguatan kapasitas dan profesionalisme guru perlu menjadi prioritas melalui program pengembangan profesional berkelanjutan yang menekankan pemahaman filosofis kurikulum, pembelajaran diferensiatif, serta integrasi nilai-nilai karakter dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Satuan pendidikan diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang kondusif dan konsisten dalam menginternalisasikan nilai karakter melalui keteladanan, pembiasaan, dan iklim belajar yang partisipatif. Selanjutnya, diperlukan sistem evaluasi dan penilaian yang lebih autentik dan komprehensif untuk mengukur capaian kompetensi kognitif, karakter, dan keterampilan peserta didik secara holistik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi reformasi pendidikan secara empiris di berbagai konteks wilayah dan jenjang pendidikan guna memperkaya bukti ilmiah serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahya, D., & Meliyani, A. (2024). Reformasi pendidikan dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka: Kajian literatur sistematis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(2), 89–105.
- Firdaus, A., Sari, R. P., & Wahyudi, A. (2022). Efektivitas pendekatan pembelajaran berbasis nalar kritis dalam meningkatkan literasi sains dan numerasi siswa sekolah menengah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(2), 45–60.
- GoodStats. (2023). *Peringkat PISA Indonesia naik tapi skor malah turun, kok bisa?* GoodStats. <https://goodstats.id/>
- Hidayah, N. (2021). *Orientasi pembelajaran hafalan vs penalaran: Dampaknya terhadap pengembangan nalar kritis siswa di Indonesia*. Repositori Institusi UPI.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan penguatan projek profil pelajar Pancasila*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.



- Kompas.id. (2025). *Skor PISA 2022: Peringkat Indonesia naik, tetapi skor membaca, matematika, dan sains turun*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/>
- Lickona, T., & Davidson, M. (2021). *Character based education: Integrating moral reasoning and social commitment in school practices*. Character Development Publishing.
- OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/>
- OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volume II): Creative thinking*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/>
- Rahayu, S., Prasetyo, B., & Indrawati, D. (2025). Integrasi pendidikan karakter dan kearifan lokal dalam Kurikulum Merdeka untuk membentuk profil pelajar Pancasila. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 31(1), 45–62.
- Rohman, A. (2022). Hubungan antara tingkat literasi membaca dan kemampuan berpikir kritis siswa SMA. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(1), 77–89.
- Sari, M. (2021). *Metode systematic literature review: Pendekatan untuk penelitian pendidikan*. Penerbit Akademia Press.
- Setyowati, R., & Sutikno, A. (2024). Peran guru dan budaya profesional dalam implementasi Kurikulum Merdeka: Studi multi kasus. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(3), 210–229.
- Umroh, S., Pratiwi, I. A., & Fauzan, R. (2025). Dominasi metode hafalan dalam sistem pembelajaran dan implikasinya terhadap kemampuan penalaran siswa: Studi kasus di sekolah menengah. *Jurnal Pedagogik*, 12(3), 210–225.
- Waly, F. (2024). *Transformasi pedagogis dalam Kurikulum Merdeka: Fleksibilitas, keadilan, dan tantangan implementasi*. Penerbit Pendidikan Indonesia.